

# Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Desa Sukajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi

Ahmad Aguswin<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Pelita Bangsa  
Jl. Inspeksi Kalimalang Tegal Danas Arah DELTA MAS, Cikarang Selatan - Kab. Bekasi  
E-mail : aaguswin@pelitabangsa.ac.id

## ABSTRAK

Kota adalah sebuah permukiman permanen dengan masyarakatnya yang bercorak heterogen. Pesatnya perkembangan permukiman di perkotaan akibat pertumbuhan penduduk kota itu sendiri maupun urbanisasi dapat menimbulkan permukiman kumuh. Salah satu kawasan permukiman kumuh di Desa Sukajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran empiris mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat penggunaan ruang status kepemilikan lahan dan bangunan keadaan prasarana dan sarana permukiman yang ada dilokasi penelitian. Selanjutnya mencari model penanganan permukiman kumuh yang sesuai untuk diterapkan pada lokasi penelitian. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan teknik sampling dan analisis kualitatif. Untuk mendapatkan data primer digunakan metode observasi wawancara dan kuesioner sedangkan data sekunder didapat dari instansi yang terkait dengan upaya penanganan permukiman kumuh. Upaya penataan permukiman kumuh perlu dilakukan demi terwujudnya lingkungan permukiman yang memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, kenyamanan, keandalan bangunan dan lingkungan. Penataan bangunan dan lingkungan didasarkan pada struktur peruntukan lahan, tata bangunan, akses/sirkulasi, ruang terbuka hijau, prasarana dan utilitas lingkungan, pengelolaan persampahan dan tata kualitas lingkungan.

**Kata kunci :** permukiman kumuh, penataan kawasan kumuh, penataan lingkungan, strategi penanganan, model penanganan

## ABSTRACT

A city is a permanent settlement with a heterogeneous society. the rapid development of settlements in urban areas due to population growth of the city itself and urbanization can lead to slum settlements. One of the slum areas in Sukajaya village, cibitung district, bekasi regency. This study aims to find out and get an empirical picture of the socio-economic conditions of the community using space, land ownership status and buildings, the state of infrastructure and settlement facilities in the research location. Next, look for a suitable model for handling slum settlements to be applied to the research location. The method used is descriptive method with sampling technique and qualitative analysis. To obtain primary data, interview and questionnaire observation methods were used, while secondary data were obtained from agencies related to efforts to deal with slum settlements. Efforts to organize slum settlements need to be carried out in order to create a residential environment that meets the requirements of security, health, comfort, reliability of buildings and the environment. The arrangement of buildings and the environment is based on the structure of land use, building layout, access/circulation, green open space, environmental infrastructure and utilities, waste management and environmental quality management.

**Keyword :** *slum settlements, structuring slum areas, structuring the environment, handling strategies, handling models*

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan suatu kota adalah proses yang tidak dapat dihindari oleh setiap kota karena tuntutan kebutuhan penduduknya yang semakin kompleks. Tingginya arus urbanisasi akibat menumpuknya sumber mata pencaharian di kawasan perkotaan menjadi magnet yang cukup kuat bagi masyarakat terutama untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk bekerja di kawasan perkotaan dan tinggal di lahan yang mendekati pusat kota, hingga akhirnya menciptakan lingkungan permukiman kumuh. Di sisi lain, menurut Kuswartojo (2005) bahwa banyak kawasan permukiman yang belum terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM) perkotaan ataupun pembangunan perumahan yang dilakukan tanpa disertai pembangunan sarana dan prasarana fasilitas. Selain itu juga bangunan permukiman yang berada di lahan legal pun pada akhirnya juga bermuara pada terciptanya kekumuhan.

Kabupaten Bekasi sebagai salah satu wilayah di Provinsi Jawa Barat dan terletak berdekatan dengan ibukota negara, merupakan salah satu kabupaten besar di Indonesia yang kemudian menjadi pusat bisnis, perdagangan, industri, dan pendidikan di kawasan barat Pulau Jawa dan sekitarnya. Kondisi yang demikian itulah yang memacu tumbuh kembang Kabupaten Bekasi yang seringkali diasosiasikan dengan perkembangan demografi, ekonomi, sosial budaya dan tidak terkecuali perkembangan fisik.

Penanganan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Bekasi diawali dengan identifikasi lokasi permukiman kumuh. Melalui identifikasi tersebut, maka kegiatan pelaksanaan penanganan kumuh yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman akan terlaksana. Kegiatan identifikasi ini juga sebagai awal dalam upaya

membangun platform kolaborasi dalam pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman sehingga terjadi keterpaduan antar sektor pembangunan untuk bersama-sama bergerak mencapai sasaran pembangunan kawasan permukiman dengan menempatkan pemerintah daerah sebagai nakhoda, masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, dan pemerintah pusat sebagai pendamping pemerintah daerah untuk mencapai target gerakan 100 0 100.

## 2. METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan dengan validitas data yang digunakan untuk menganalisis data dan dibahas secara kualitatif dalam kerangka deskriptif. Penelitian dilakukan di Desa Sukajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Metode pengumpulan data yang digunakan secara observasi langsung pada objek penelitian dan melalui wawancara dimana pengumpulan informasi melalui tanya jawab kepada pihak yang berhubungan dengan penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya di analisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk menjawab dan mendapatkan solusi bagi permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya serta memberi usulan pengembangan.

## 3. LANDASAN TEORI

Pengertian kawasan kumuh (Slum) jika mengacu kepada definisi menurut UN Habitat adalah

*“Contiguous settlement where the inhabitants are characterized as having inadequate housing and basic services. A slum is often not recognized and addressed by the public authorities as an integral part of the city”* (UN-Habitat, 2009).

Indonesia sudah memiliki definisi tersendiri tentang kawasan kumuh. Undang-undang No.1 Tahun 2011 Bab 1

Ketentuan Umum Pasal 1 Nomor 13 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebagai berikut.

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Sedangkan di poin 14-nya mendefinisikan tentang Perumahan kumuh, yaitu perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Sedikit lebih detil daripada itu, pada satuan yang lebih kecil, BPS mendefinisikan Rumah tangga Kumuh sebagai Rumah tangga yang tidak memiliki akses air minum (air minum layak), akses sanitasi (sanitasi layak), *sufficient living area*, dan *durability of housing*.

Kawasan permukiman kumuh seringkali diidentikkan dengan keberadaan penduduk miskin. Persepsi ini tidak selalu benar karena di dalam kawasan permukiman kumuh juga terdapat penduduk yang tidak termasuk kategori miskin. Hal ini ditandai dengan kondisi rumah dan fasilitas yang mereka miliki di kawasan permukiman kumuh tersebut. Ada dua hal yang mencirikan kawasan disebut kumuh, yaitu (Basri, 2010):

- Kawasan tersebut tidak atau kurang terlayani dengan infrastruktur pendukung kawasan seperti jaringan jalan, drainase, saluran limbah, dan lain-lain sehingga kawasan tersebut cenderung mengalami degradasi; dan
- Hunian di kawasan tersebut secara kasat mata terlihat tidak layak huni yang ditandai dengan kurangnya ventilasi maupun pencahayaan, di samping itu material bangunannya yang tidak layak dijadikan sebagai bahan bangunan untuk sebuah hunian.

Kajian tentang permukiman kumuh pada umumnya mencakup tiga segi,

pertama kondisi fisiknya, kedua kondisi sosial ekonomi budaya komunitas yang bermukim di permukiman tersebut, dan ketiga dampak oleh kedua kondisi tersebut (Santosa, 2007). Kondisi fisik antara lain tampak dari kondisi bangunan yang sangat rapat dengan kualitas konstruksi rendah, jaringan jalan tidak berpola dan kondisi perkerasan yang kurang baik, sanitasi umum, dan saluran drainase tidak berfungsi dengan baik serta pengelolaan sampah yang kurang baik. Sedangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di kawasan permukiman kumuh antara lain mencakup tingkat pendapatan rendah, norma sosial yang longgar, budaya kemiskinan yang mewarnai kehidupannya antara lain tampak dari sikap dan perilaku yang apatis. Kondisi tersebut sering juga mengakibatkan kondisi kesehatan yang buruk, sumber pencemaran, sumber penyebaran penyakit dan perilaku menyimpang yang berdampak pada kehidupan kota keseluruhannya. Oleh karena itu kawasan permukiman kumuh dianggap sebagai permasalahan kota yang harus segera diatasi.

NGO *Forum for Urban Water and Sanitation* menyebut setidaknya ada 7 indikator yang dapat mempengaruhi suatu kawasan disebut kumuh atau tidak, yaitu:

- Kepadatan Penduduk (*Population density*) – Kepadatan penduduk yang menghuni kawasan tersebut, artinya semakin tinggi kepadatan penduduk yang tinggal di kawasan tersebut maka masuk dalam kategori kawasan kumuh.
- Kondisi infrastruktur (*Infrastructure*) – Aksesibilitas terhadap layanan publik seperti jalan penyediaan air baku dan air minum, sistem pengelolaan air limbah di kawasan tersebut, artinya semakin minim akses masyarakat terhadap layanan infrastruktur, maka semakin menunjukkan kekumuhan kawasan tersebut.

- Pendapatan Penduduk (*Income*) – Pendapatan penduduk secara umum di kawasan tersebut, Semakin rendah rata-rata pendapatan penduduk yang tinggal di kawasan tersebut, maka semakin berpotensi pula menyebabkan kawasan kumuh (karena ketidak mampuan menyediakan hunian dan lingkungan yang sehat dan layak huni).
- Status sosial (*Social status*) – Status sosial masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut, Mungkin tidak selalu linier, akan tetapi pada umumnya masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut, bukan merupakan masyarakat yang berstatus sosial tinggi (baik secara jabatan, pekerjaan, profesi, dan lain-lain).
- Material konstruksi rumah (*Construction material of houses*) – Apakah permanen, semi permanen atau non permanen sama sekali, semakin bahan materialnya tidak permanen (seperti kayu, triplek, dan lain-lain), maka berkontribusi menciptakan kekumuhan.
- Aspek legal (*Legal aspect*) – Terutama kepemilikan atas lahan di wilayah tersebut, pada umumnya masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh, tidak memiliki status yang jelas atas lahan yang mereka tinggali (penyewa, penempatan secara ilegal atau squatters, dan lain-lain).
- Kesehatan dan sanitasi (*Health and sanitation*) – suatu kawasan yang dikatakan kumuh, pada umumnya memiliki sanitasi yang kurang layak serta kurang memperhatikan aspek kesehatan para penghuninya sendiri.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Banyak permasalahan perkotaan di Kabupaten Bekasi yang berakar pada kawasan permukiman, seperti tidak

meratanya penyediaan infrastruktur permukiman perkotaan, ketidaktersediaan lingkungan permukiman yang layak, dan sebagainya yang pada akhirnya berimplikasi pada terciptanya permukiman kumuh di kawasan perkotaan. Permasalahan yang ditimbulkan dari munculnya kawasan permukiman kumuh seperti lingkungan yang tidak sehat, pemanfaatan lahan ilegal, dan lain sebagainya tidak hanya berpengaruh terhadap internal kawasan itu sendiri namun juga terhadap kawasan sekitarnya dan sistem jaringan infrastruktur perkotaan secara umum.

Belum efektifnya penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Bekasi (khususnya dalam konteks perkotaan) hingga saat ini diakibatkan oleh beberapa kondisi sebagai berikut:

- tuntutan yang tinggi terhadap pemenuhan kebutuhan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan belum didasarkan pada kebijakan dan strategi pembangunan yang memadai, tepat, berskala kabupaten/kota, dan berbasis kawasan;
- Belum terdapatnya strategi penanganan dan pentahapan baik dalam tahapan kegiatan maupun kawasan penanganan pada program penanganan permukiman kumuh skala kota;
- Kebijakan untuk meningkatkan pembangunan kota kurang memperhatikan kebutuhan penanganan kawasan kumuh, karena pembangunan kota lebih berfokus pada upaya peningkatan pertumbuhan perekonomian serta pembangunan infrastruktur skala kota dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat perkotaan secara umum;
- Upaya pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang menjadi tugas dan wewenang pemerintah daerah (UU No. 1/2011) tetapi belum optimalnya upaya dan

kemampuan pemerintah daerah dalam hal kapasitas SDM dan pembiayaan; dan

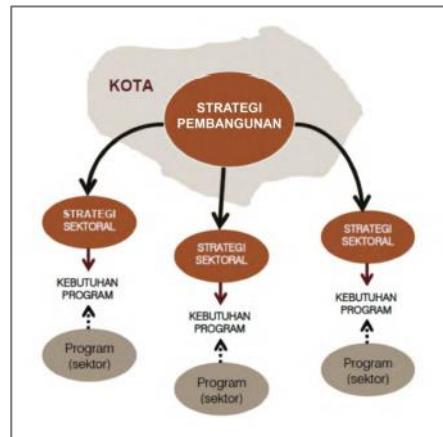
- Terdapat ketidaksinkronan antar instansi di daerah dalam menentukan kebijakan penanganan terutama penentuan lokasi dan bentuk penanganan yang akan dilakukan pada tahap selanjutnya.

Berdasarkan permasalahan pembangunan yang ada tersebut, diperlukan beberapa pertimbangan, antara lain:

- bahwa dalam penanganan permukiman kumuh memerlukan adanya arahan yang jelas hingga ke tataran teknis operasional dan selaras dengan arah pengembangan Kabupaten Bekasi;
- bahwa dalam penanganan permukiman kumuh diperlukan arahan yang didasarkan pada kebutuhan kawasan dan berorientasi pada penanganan akar masalahnya;
- bahwa penanganan permukiman kumuh perlu diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan, dengan memuat unsur pencegahan dan peningkatan kualitas sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang- Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
- bahwa dalam pengembangan kabupaten Bekasi dan kawasan permukiman perkotaan terdapat kebutuhan untuk merumuskan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang mampu mendukung dan mengintegrasikan seluruh strategi sektoral yang terkait.

Terkait dengan hal ini, program-program yang diselenggarakan mengacu pada kebutuhan untuk menjawab strategi yang telah dirumuskan dan skala prioritasnya. Selain itu, program yang dikembangkan dapat mendukung terwujudnya tujuan dan kebijakan

pembangunan permukiman pada Kabupaten Bekasi secara umum.



Gambar 1. Ilustrasi Arah Pembangunan Kota yang Dibentuk Berdasarkan pada Kebutuhan Kabupaten Bekasi

Tabel 1. Proses Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

Muatan Peningkatan Kualitas	Pelaku	Metode
<b>Pola Penanganan</b>		
Perbaikan, pembangunan kembali menjadi permukiman layak huni	Pemerintah, Masyarakat, dan Swasta	Advokasi Pemda, Penyiapan masyarakat, Pembangunan Fisik Tersier dan Fisik Primer
Mewujudkan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan masyarakat sekitar dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat	Pemerintah, Masyarakat, dan Swasta	Advokasi Pemda, Penyiapan masyarakat, Pembangunan Fisik Tersier dan Fisik Primer
Pemindahan masyarakat dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali/ tidak	Pemerintah, Masyarakat, dan Swasta	Advokasi Pemda, Penyiapan masyarakat, Pembangunan Fisik Tersier

Muatan Peningkatan Kualitas	Pelaku	Metode
sesuai dengan rencana tata ruang dan/ atau rawan bencana serta menimbulkan bahaya bagi barang ataupun manusia (contoh: penyediaan Rusunawa, Rumah deret)		dan Fisik Primer

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Peningkatan kualitas permukiman kumuh merupakan bagian dari upaya perwujudan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, dimana dalam hal ini tidak dapat dilepaskan dari upaya pencapaian target pembangunan sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMN. Dalam implementasinya, upaya ini dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan utama pembangunan dalam bidang pembangunan yaitu membangun sistem, memfasilitasi pemerintah daerah, dan membangun kapasitas masyarakat. Ketiga pendekatan ini yang menjadi prinsip pembangunan dan pengembangan permukiman yang mengarah pada pencapaian gerakan 100-0-100 pada tahun 2019, sebagaimana tergambar pada Gambar di bawah ini.



Gambar 2. Pendekatan dalam Pembangunan dan Pengembangan Permukiman

Lebih lanjut bila dikaitkan dengan upaya peningkatan kualitas permukiman

kumuh, maka dalam Penataan Kawasan Permukiman Kumuh paling tidak memuat 4 (empat) prinsip perencanaan, penanganan dan pencegahan permukiman kumuh yaitu:

- Perencanaan yang komprehensif dalam Penataan Kawasan Permukiman Kumuh adalah melakukan perencanaan penanganan permukiman kumuh secara menyeluruh meliputi aspek sosial, ekonomi, fisik lingkungan;
- Pembangunan yang terintegrasi dalam Penataan Kawasan Permukiman Kumuh adalah melakukan perencanaan pembangunan tersistem dari skala lingkungan, kawasan dan kota;
- Keterpaduan program (Kolaboratif dan Sinergitas) dalam Penataan Kawasan Permukiman Kumuh adalah melakukan penyusunan rencana investasi pembangunan yang melibatkan semua sumber pembiayaan dari Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan swasta;
- Keberlanjutan dalam Penataan Kawasan Permukiman Kumuh adalah melakukan penyusunan rencana pengelolaan paska pembangunan; dan
- Pembangunan Hijau.

Pengambilan data dilakukan secara partisipatif dimana proses survey adalah melaksanakan identifikasi atas beberapa komponen infrastruktur sesuai dengan kriteria kumuh yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PUPR no 2 tahun 2016 tentang peningkatan kualitas permukiman kumuh. Berikut adalah beberapa komponen fisik yang akan diamati dan diukur didalam pelaksanaan kegiatan survey lapangan.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan maka dapat disimpulkan mengenai profil kawasan Kumuh di Desa Sukajaya adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Profil Kawasan Kumuh Desa Sukajaya

No	Kriteria / Indikator Fisik	Parameter		Nilai
<b>A. KONDISI FISIK</b>				
1	Keteraturan Bangunan	84%	Bangunan Hunian tidak memiliki keteraturan	5
2	Tingkat Kepadatan Bangunan	84%	Kawasan permukiman memiliki Kepadatan Tinggi (350 unit/Ha)	5
3	Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	27%	Bangunan hunian memiliki kondisi tidak sesuai persyaratan teknis	1
4	Aksesibilitas Lingkungan	0%	Kawasan permukiman tidak terlayani jaringan jalan lingkungan yang memadai	1
		31%	Kondisi Jaringan jalan pada kawasan permukiman memiliki kualitas buruk	1
5	Drainase Lingkungan	0%	Kawasan permukiman terjadi genangan/banjir	1
		78%	Kondisi jaringan drainase pada lokasi permukiman memiliki kualitas buruk	5
6	Pelayanan Air Minum/Baku	36%	Bangunan hunian pada lokasi permukiman tidak terlayani jaringan Air Bersih/Baku perpipaan atau non perpipaan terlindungi yang layak	1
		64%	Masyarakat tidak	3

No	Kriteria / Indikator Fisik	Parameter		Nilai
			terpenuhi kebutuhan minimal 60liter/org/hari (Mandi, Minum, Cuci)	
7	Pengelolaan Air Limbah	3%	Bangunan hunian pada lokasi permukiman tidak memiliki akses Jamban/MC K Komunal	1
		33%	Bangunan hunian pada lokasi permukiman tidak memiliki kloset (Leher Angsa) yang terhubung dengan tangkiseptik	1
		100%	Saluran Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga tercampur dengan Drainase Lingkungan	5
8	Pengelolaan Persampahan	66%	Sampah domestik rumah tangga pada kawasan permukiman terangkut ke TPS/TPA kurang dari 2 kali seminggu	3
9	Pengamanan Bahaya Kebakaran	100%	Kawasan permukiman tidak memiliki Ketersediaan prasarana/sarana Proteksi Kebakaran	5
<b>B. NON FISIK</b>				
1	Legalitas pendirian bangunan	96,22%	Bangunan Hunian tidak memiliki IMB	(-)
		15,08%	Lahan Bangunan Hunian tidak Memiliki SHM/HGB/	(-)

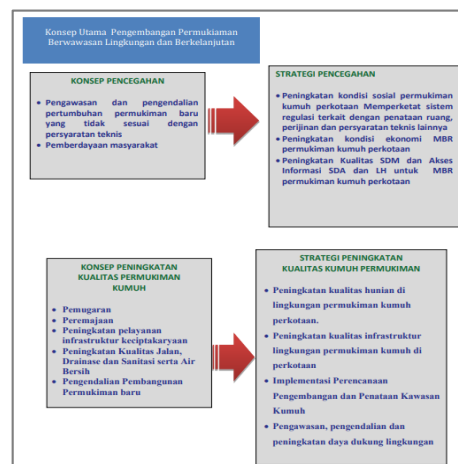
No	Kriteria / Indikator Fisik	Parameter	Nilai
			Surat yang diakui pemerintah
2	Nilai Strategis Lokasi	100 %	Lokasi tidak terletak pada fungsi strategis kabupaten/ kota
3	Kependudukan	410	Kepadatan Penduduk Jiwa/Ha
4	Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya	100 %	Lokasi tidak memiliki potensi sosial, ekonomi, dan budaya tinggi untuk dikembangkan atau dipelihara
<b>Total Nilai Identifikasi Desa Sukajaya</b>			<b>45</b>

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Secara umum Gambaran Karakteristik Kawasan Pemukiman Kumuh Kawasan Desa Sukajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi seperti pada tabel di atas. Berdasarkan tujuh kriteria, berdasarkan kriteria kumuh, dan gambaran hasil survey lapangan maka hasil perhitungan berdasarkan 7 kriteria dan 19 parameter kekumuhan di Kawasan Kawasan Desa Sukajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi termasuk dalam kategori Kumuh Sedang dengan nilai total parameter sebesar 45. Sedangkan berdasarkan pertimbangan lain, Desa Sukajaya memiliki termasuk dalam kategori Pertimbangan Lain Tinggi dengan nilai parameter sebesar 7. Dan berdasarkan kondisi status legalitas, maka Desa Sukajaya memiliki Status Lahan Tidak Legal dengan nilai negatif (-). Berdasarkan hasil penilaian tersebut, maka kemungkinan klasifikasi perumahan dan permukiman kumuh di Desa Sukajaya adalah B2 yang menghasilkan jenis prioritas penanganan yaitu Prioritas Penanganan 2.

Strategi peningkatan kualitas di kawasan kumuh Desa Sukajaya disampaikan dalam gambar berikut:

- Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak dan sehat
- Menata dan memperbaiki lingkungan permukiman padat dan kumuh
- Memperbaiki rumah tidak layak huni
- Meningkatkan dan mengendalikan integrasi antar lingkungan dan kawasan permukiman
- Mengendalikan dan menata perumahan di lokasi padat penduduk
- Menyediakan fasilitas permukiman sesuai dengan kriteria dan ketentuan berlaku
- Menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) perkotaan sesuai dengan ketentuan di lingkungan permukiman
- Peningkatan cakupan pelayanan air limbah kawasan perkotaan dengan sistem setempat
- Peningkatan cakupan pelayanan persampahan yang belum terlayani pengelolaan persampahan
- Meningkatkan aksesibilitas kawasan permukiman padat untuk sistem proteksi kebakaran dan keadaan darurat lainnya melalui peningkatan jalan sesuai standar



Gambar 3. Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Sukajaya





Gambar 4. Rencana Pengembangan Taman Baca sebagai Salah Satu Konsep Penataan Kawasan Kumuh Sukajaya



Gambar 5. Rencana Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk Taman Baca



Gamabr 6. Rencana RTH di dalam Kawasan Permukiman Kumuh Sukajaya

## 5. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil kajian yang dilakukan terhadap Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Desa Sukajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi adalah:

1. Tujuan dan kebijakan penanganan kawasan permukiman kumuh Kabupaten

Bekasi dirumuskan dengan melihat arah kebijakan pembangunan dan penataan ruang Kabupaten Bekasi terkait dengan penanganan kawasan permukiman kumuh, kondisi eksisting kawasan permukiman kumuh, isu strategis kawasan permukiman kumuh, dan kebutuhan penanganan kawasan permukiman kumuh.

2. Kebijakan penanganan kawasan permukiman kumuh di Desa Sukajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi adalah sebagai berikut:

- Peningkatan dan pengembangan sistem pengawasan kawasan permukiman untuk penanganan kumuh.
- Pengendalian pembangunan permukiman pada kawasan yang tidak sesuai peruntukannya.
- Peningkatan kapasitas dan kerjasama kelembagaan dalam penanganan permukiman kumuh
- Peningkatan sarana dan prasarana permukiman kumuh yang didukung dengan upaya mitigasi bencana di daerah rawan bencana.
- Menggali dan mengembangkan sumber-sumber pembiayaan dalam penanganan permukiman kumuh.

3. Strategi penataan kawasan permukiman kumuh dilakukan dengan prinsip untuk:

- Peningkatan dan pengembangan kawasan permukiman untuk penanganan kumuh;
- Pengendalian pembangunan permukiman pada kawasan yang tidak sesuai peruntukannya;

- Peningkatan kapasitas dan kerjasama kelembagaan dalam penanganan permukiman kumuh;
- Peningkatan sarana dan prasarana pemukiman kumuh yang didukung dengan upaya mitigasi bencana;
- Menggali dan mengembangkan sumber-sumber pembiayaan dalam penanganan permukiman kumuh;
- Pengelolaan pemeliharaan untuk keberlanjutan;

*Permukiman Kota*. Bandung: Alumni.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

UN-Habitat. 2009. *Global Report on Human Settlements 2009: Planning Sustainable Cities*. London: Earthscan.

## DAFTAR PUSTAKA

Basri, H. 2010. *Model Penanganan Permukiman Kumuh Studi Kasus Permukiman Kumuh Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur Kota Palopo*. Surabaya: Program Pasca Sarjana Jurusan Arsitektur FTSP Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Kuswartojo, Tjuk. 2005. *Perumahan dan Permukiman di Indonesia*. Bandung: ITB.

Santosa, D.P. 2007. *Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan Melalui Penyediaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)*. Bandung: Jurnal Universitas Pasundan

Sinulingga. B.D. 1999. *Pembangunan Kota: Tinjauan Regional dan Lokal*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Sutrisno. L. 1998. *Suatu Catatan Sosiologis Tentang Kemerosotan Tertib Membangun dan Kesadaran Lingkungan di Indonesia: Sejumlah Masalah*